

Kelompok Ornop menyusun agenda kunci mengatasi illegal logging untuk 100 hari pertama Presiden

Jakarta, 29 September 2004: Perwakilan masyarakat sipil/Ornop yang aktif bekerja memerangi mafia/cukong kayu timber mafia hari ini menyampaikan agenda kunci 100 hari pertama presiden baru untuk mengatasi illegal logging. Dalam pertemuan di News Café Jakarta dengan kalangan media, politikus, dan lembaga donor international, kelompok Ornop ini mempresentasikan video and foto dari kejahatan kehutanan yang terjadi di hutan Indonesia saat ini.

Pertemuan ini diselenggarakan oleh Telapak dan Environmental Investigation Agency (EIA) untuk menunjukkan hasil dokumentasi visual dari mitra di seluruh Indonesia. Telapak dan EIA telah mendukung mitra dalam melakukan investigasi dan dokumentasi kejahatan kehutanan dalam 4 tahun terakhir melalui dukungan program kerjasama Pemerintah Indonesia dan Program Kehutanan Multipihak DFID (Department for International Development's Multistakeholder Forestry Programme).

Kelompok Ornop ini menyampaikan kepada Susilo Bambang Yudhoyono and seluruh institusi pemerintah untuk memberikan prioritas dalam mengatasi illegal logging yang mana nyata-nyata menyuburkan korupsi yang endemik yang dimotori oleh mafia/cukong kayu yang terorganisir dan memiliki dana besar. Para cukong kayu besar ini telah banyak diidentifikasi akan tetapi tindak lanjut yang jelas masih sangat sedikit. Perwakilan masyarakat sipil/kelompok Ornop menyusun agenda untuk 100 hari pertama Presiden:

- **Pembentukan Gugus Tugas (Task Force) Illegal Logging yang proaktif dan menyampaikan laporan langsung kepada presiden.**
- **Pembentukan pengadilan ad hoc yang terdiri dari hakim yang terpercaya/kredibel dan jaksa yang berkomitmen tinggi untuk menangani kasus-kasus besar illegal logging.**
- **Keberhasilan penghukuman cukong-cukong kayu besar dan pejabat/aparat korup dalam pengadilan ad hoc yang mana akan menyampaikan pesan nyata bahwa pihak-pihak yang membiayai dan mengambil keuntungan dari illegal logging akan dijerat.**
- **Pengesahan peraturan/surat keputusan yang menetapkan bukti visual (video dan foto) sebagai bukti yang dapat diajukan dalam pengadilan ad hoc.**
- **Pembaharuan upaya proaktif melalui Departemen Luar Negeri untuk menindaklanjuti perjanjian bilateral/MoU terkait perdagangan kayu dengan pemerintah Cina dan kerjasama bilateral di tingkat regional untuk mengatasi illegal logging.**
- **Pengesahan peraturan tentang pengalihan hasil uang dari proses lelang kayu-kayu ilegal yang transparan untuk aktivitas penegakan hukum.**

“Ornop yang bekerja aktif memerangi illegal logging telah banyak yang mempertaruhkan nyawanya dalam upaya mengumpulkan bukti terjadinya tindak kejahatan kehutanan sementara rekognisi dari elit politik sangatlah kecil,” kata **Dave Currey**, Direktur EIA. “Dedikasi untuk menghentikan bencana kehutanan di Indonesia ini membutuhkan rekognisi dan tindak lanjut aksi dari Presiden Indonesia yang baru.”

Perwakilan Ornop yang hadir meliputi PASE, YLL, Hakiki, Ulayat, Wanacala, ARuPA, Silvagama, Lakpesdam, Jurnal Celebes, Evergreen, Yascita, LPMA, Madanika, dan Padi.

Arbi Valentinus, Koordinator Program Terrestrial Telapak mengatakan, “Mitra-mitra mengetahui secara jelas aktivitas illegal logging dan kerusakan yang disebabkan olehnya di seluruh Indonesia. Kami semua bersama-sama mendesak Presiden yang baru untuk memerangi korupsi yang memicu illegal logging melalui 6 langkah utama tersebut.”

Kontak: Telapak – **Arbi Valentinus** 0811 11 7143
EIA – **Dave Currey** 0812 987 3155 *atau* **Julian Newman** 0812 998 6264

Catatan untuk Editor:

- Indonesia memiliki sepuluh persen hutan tropis dunia yang tersisa saat ini.
- Lebih dari 70 persen hutan alam di Indonesia telah musnah.
- Hasil penelitian telah menunjukkan bahwa sekitar 80 persen produk kayu di Indonesia berasal dari sumber-sumber illegal.
- EIA adalah organisasi lingkungan nirlaba yang berkedudukan di London dan Washington DC. Informasi lebih lanjut dapat diperoleh di www.eia-international.org
- Telapak adalah organisasi lingkungan nirlaba yang berkedudukan di Bogor, Indonesia. Informasi lebih lanjut dapat diperoleh di www.telapak.org

Penjelasan lebih lengkap tentang agenda kunci:

Pembentukan Gugus Tugas (Task Force) Illegal Logging yang proaktif dan menyampaikan laporan langsung kepada presiden. Penting sekali bagi presiden untuk mengambil tanggung jawab langsung atas bekerjanya gugus tugas ini untuk mengatasi kemandegan interdepartemen. Pihak-pihak yang bekerja dalam gugus tugas ini harus meliputi Departemen Kehutanan, Departemen Perindustrian dan Perdagangan, Kejaksaan Agung, TNI, dan Polri. Gugus tugas ini perlu menggunakan semua instrumen hukum termasuk peraturan tentang pencucian uang.

Pembentukan pengadilan ad hoc yang terdiri dari hakim yang terpercaya/kredibel dan jaksa yang berkomitmen tinggi untuk menangani kasus-kasus besar illegal logging. Korupsi dan kegagalan peradilan telah membuat lambatnya penuntasan masalah illegal logging pada pemerintahan sebelumnya. Pembentukan pengadilan ad hoc sangatlah penting guna mempercepat proses peradilan, yang mana akan menyampaikan pesan nyata bahwa selain merupakan persoalan lingkungan yang penting, illegal logging adalah juga persoalan ekonomi dan keamanan yang serius bagi bangsa ini. Ini adalah situasi yang mendesak.

Keberhasilan penghukuman cukong-cukong kayu besar dan pejabat/aparat korup dalam pengadilan ad hoc yang mana akan menyampaikan pesan nyata bahwa pihak-pihak yang membiayai dan mengambil keuntungan dari illegal logging akan dijerat. Para cukong besar telah diketahui identitasnya oleh Dephut, Polisi, Ornop dan media. Para

pejabat/aparat senior yang korup diketahui bekerja sama dengan para cukong. Keberhasilan dalam menyidangkan beberapa kasus illegal logging besar akan jadi momentum penting bagi pemberantasan illegal logging.

Pengesahan peraturan/surat keputusan yang menetapkan bukti visual (video dan foto) sebagai bukti yang dapat diajukan dalam pengadilan ad hoc. Masyarakat sipil/Ornop di seluruh Indonesia memiliki bukti berharga tentang illegal logging di hutan Indonesia. Bukti yang direkam dengan kamera dengan koordinat GPS yang didapat dari lokasi terjadinya kejahatan harus dapat dijadikan sebagai bukti di pengadilan ad hoc.

Pembaharuan upaya proaktif melalui Departemen Luar Negeri untuk menindaklanjuti perjanjian bilateral/MoU terkait perdagangan kayu dengan pemerintah Cina dan kerjasama bilateral di tingkat regional untuk mengatasi illegal logging. Sebuah MoU telah ditandatangani dengan Cina pada tahun 2002 untuk membantu mengatasi perdagangan kayu ilegal yang masuk ke Cina, namun meskipun rancangan rencana kerja telah disusun, belum ada tindakan/aktivitas nyata yang dilakukan. Cina hingga kini adalah pengimpor besar untuk kayu bulat (log) dan olahan dari Indonesia walaupun telah ditetapkan larangan ekspor log di Indonesia. Departemen Luar Negeri harus lebih proaktif melakukan pembicaraan dengan Cina terkait MoU ini.

Pengesahan peraturan tentang pengalihan hasil uang dari proses lelang kayu-kayu ilegal yang transparan untuk aktivitas penegakan hukum. Pelelangan kayu sering dipandang sebagai proses “pencucian”, karena kayu-kayu tersebut diketahui kembali ke pihak yang merupakan bagian/jaringan dari pemilik awal kayu ilegal tersebut. Hal ini sangat mungkin terjadi karena proses lelang kayu sitaan tidak transparan, oleh karenanya semua proses pelelangan kayu harus transparan serta hasil dari pelelangan harus dialokasikan dan dipakai untuk pembiayaan aktifitas penegakan hukum.

/end